



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**BAB II**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**Pasal 2**

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
  - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - e. BAB IV PENUTUP

**Pasal 3**

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 4**

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN XXII : PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 51 TAHUN 2025  
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026





**PEMERINTAH  
KOTA BATAM**

# **RENCANA KERJA TAHUN 2026 DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



## **Lokasi**

📍 Jalan Ir. Sutami Nomor 1, Sekupang,  
Kota Batam

## **Hubungi Kami**

- 📞 0811-777-6507
- 📍 dlh.batam.go.id
- ✉️ kotabatam.dlh@gmail.com

**KATA PENGANTAR**

Atas Berkah dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh semangat pengabdian untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2026. Rencana Kerja ini merupakan salah satu bagian dari substansi perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sinkronisasi dari Perencanaan Strategis Pemerintah Kota Batam.

Penyusunan Rencana Kerja dilakukan sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah serta mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap mengedepankan dan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan bidang kewenangan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Rencana Kerja ini merupakan penyempurnaan dari Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026 yang disusun dengan berpedoman kepada Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan menyelaraskan kondisi eksisting serta isu-isu strategis yang ada pada saat ini.

Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan selama jangka waktu 1 tahun, juga akan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja Instansi/Organisasi, berdasar pada data realisasi dan tingkat pencapaian target yang dapat dipertanggungjawabkan baik di lapangan (fisik) maupun secara administrasi.

Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu kepada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsisten terhadap perencanaan yang telah ditetapkan.

Sebagai akhir kata, dengan memohon petunjuk dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, agar senantiasa berusaha melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah tersusun, sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Batam, September 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Batam

Dr. Herman Rozie, S.STP., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19770512 199612 1 001

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.1.1    Pengertian Renja Perangkat Daerah .....	1
1.1.2    Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah .....	1
1.1.3    Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	2
1.2    Landasan Hukum.....	4
1.3    Maksud dan Tujuan .....	5
1.4    Sistematika Penulisan .....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	7
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup .....	7
2.2    Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	27
2.3    Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.....	30
2.4    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	33
2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	48
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	50
3.1    Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Lingkungan Hidup.....	50
3.2    Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup .....	53
3.3    Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 .....	55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	63
BAB V PENUTUP .....	88
5.1    Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja .....	88
5.2    Kaidah-kaidah pelaksanaan .....	89
5.3    Rencana Tindak Lanjut .....	89
LAMPIRAN	

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	2
--	---

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Batam.....	8
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.....	29
Tabel 2.3. <i>Review</i> Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Batam Tahun 2026.....	33
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota Batam Tahun 2026 .....	48
Tabel 3.1. Target, Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026.....	55
Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Batam .	57
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2026.....	71

**DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Formulir E.70
- B. SK Tim

**BAB I PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

**1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah**

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan lingkungan hidup, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

**1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Renja
- c. Penyusunan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Renja
- f. Penetapan Renja

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan yang dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



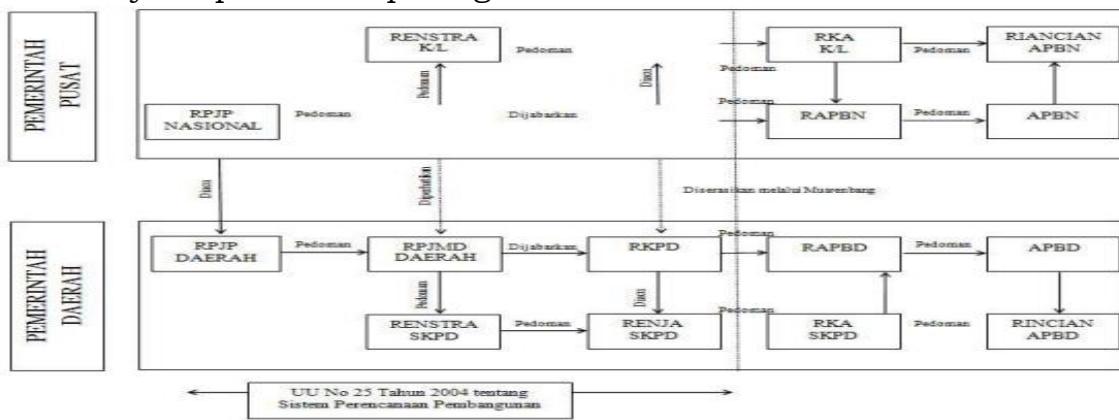
Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

### 1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP'D) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Renja Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian Misi Kota Batam yang ke-5 (lima), yaitu “Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung Pembangunan berkelanjutan”.

Adapun sasaran yang akan dicapai, yaitu :

- Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola
- Penerapan *Green and Blue Economy*
- Pembangunan Inklusif

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/ 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 17 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 18 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029;
- 19 Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 20 Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup;
- 21 Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 22 Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang RKPD Kota Batam Tahun 2026;
- 23 Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2026 dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai

tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dengan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah RKPD Tahun 2026.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

#### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2.1), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah (2.2), isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (2.3), review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (2.4) dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (2.5).

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional (3.1). tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah (3.2), program dan kegiatan (3.3) yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun 2026 yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2026.

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2026

#### **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan, catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN  
LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dan  
Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup.**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2024 adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2026 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun 2025 sebagai dasar awal dalam penyusunan perencanaan tahun 2026;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program kegiatan tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam telah melaksanakan sejumlah program melalui kegiatan yang ada dengan dana APBD Perubahan Tahun 2025 yaitu sebesar Rp 164.597.867.613,00 (Seratus Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah)

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Batam dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
									(2026)	(2023)	(2024)	(2024)	(2025)	(202	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%
2	11	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Terlaksana	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
2	11	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
2	11	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
2	11	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
						(2026)	(2023)	(2024)		(2025)	(2025)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 =	
2	11	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	-	-	-	-
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/Bulan	77 Orang/Bulan	93 Orang/Bulan	93 Orang/Bulan	100%
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum terlaksana	100%	-	-	-	-
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	-	-	-	-
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)			
						(2026)	(2023)	(2024)		(20)	(2025)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 =				
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di	2 Paket	2 Paket	-	-	1 Paket	1 Paket	100%	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	100%
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	-	-	-
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	-	-	-	2 Paket	2 Paket	100%
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan tersedia	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	12 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	100 %	100 %	-	-	100%	100 %	100 %	100%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisa si (%)				
						(2026)	(2023)	(2024)	(2024)	(2025)	(2025)	
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 =	
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan	7 Unit	7 Unit	-	-	14 Unit	14 100%
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan 100%
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan 100%
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	11	01	2.09	01	penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit 100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah s/d tahun berjalan) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%) (2024)			
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2025)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2025)	Tingkat Realisasi (%) (2025)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4				
					atau Kendaraan Dinas Jabatan									
2	11	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	81 Unit	220 Unit	220 Unit	100%	33 Unit	33 Unit	100%
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	190 Unit	71 Unit	16 Unit	16 Unit	100%	96 Unit	96 Unit	100%
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	-	-	-
2	11	02	.		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	11	02	2.01	06	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 202 6	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun				
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)			
						(2026)	(2023)	(2024)		(2025)	(2025)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 =				
				mengakomodir arahan RPPLH Provinsi										
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH	1 Dokumen	-	-	-				
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Kajian	-	100 %	-	-				
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	-	1 Dokumen	-	-				
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Kualitas Lahan (IKL)	55,50; 84,50; 63,24	52,00; 84,12; 62,64	52,47; 88,76; 69,08	52,00; 84,12; 62,64	100%	53,59; 89,62; 70,09	53,59; 89,62; 70,09	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									(2026)	(2023)	(2024)		(2025)	(2025)
1		2		3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Percentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	11	03	2.01	01	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Jumlah Dokumen uji kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	1500 Dokumen	1500 Dokumen	1500 Dokumen	1500 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	11	03	2.01	09	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-	-	-	-	-	10 Unit	10 Unit	100%
2	11	03	2.01	15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	59 Dokumen	10 Dokumen	49 Dokumen	49 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%) (2024)				
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4		
2	11	03	2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Percentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	-	-	-	-	-	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	10 Laporan	-	-	-	-	
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	15 Titik	-	-	-	-	
2	11	03	2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Percentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	-	-	-	100%	100%	
2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor	27 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan											
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)										
						(2026)	(2023)	(2024)		(2025)	(2025)										
1		2		3		4		5		6		7		8 = 7/6x100		9		10 = 5+7+9		11 = 10/4	
					Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan																
2	11	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Persentase Perizinan yang Dibina dan Diawasi	80%	-	-	-	-	-	70%	70%	70%	100%					
2	11	06	201		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan	80%	-	-	-	-	-	70%	70%	70%	100%					
2	11	06	201	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026  (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)  (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)  (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan  Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)  (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)  (2025)		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)  (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)  (2024)	Tingkat Realisasi (%)  (2025)					
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)  (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)  (2025)						
1		2		3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4				
2	11	06	201	09	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	100 Badan Usaha	-	100 Badan Usaha	100 Badan Usaha	100%	100 Badan Usaha	100 Badan Usaha	100%		
2	11	06	301		<b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan</b>	<b>80%</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	11	06	301	05	Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak memtaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak memtaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	25 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						(2026)	(2023)	(2024)		(2025)	(2025)
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
2	11	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP	Percentase peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	11	08	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	3 Jumlah	100%	100%	100%	3 Jumlah	3 Jumlah
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	7 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	11	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Percentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	11	09	201		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	5 Jumlah	5 Jumlah	5 Jumlah	5 Jumlah	5 Jumlah
2	11	09	201	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia	3 Entitas	-	3 Entitas	3 Entitas	100%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						(2024)	(2024)	(2025)		(2025)		
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4	
		Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	pendidikan/filantropi yang di nilai kinerjanya dalam rangka PPLH									
2	11	10		<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa</b>	90%	-	-	-	90%	90%	
2	11	10	201	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang terselesaikan	90%	-	-	-	90%	90%	
2	11	10	201	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota	45 Dokumen	-	-	-	-	-
2	11	10	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup	2 Dokumen	-	-	-	-	-

**RENCANA KERJA TAHUN 2026**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
									(2026)	(2023)	(2024)		(2025)	(2025)	
1		2		3	4	5	6	7	8 = 7/6x100		9	10 = 5+7+9		11 = 10/4	
					Pengadilan	pengadilan									
2	11	10	201	04	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Pengaduan	-	10 Pengaduan	10 Pengaduan	100%	40 Pengaduan	40 Pengaduan	100%	
2	11	10	201	06	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat	-	-	-	-	-	5 Perkara	5 Perkara	100%	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>.</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase Pengurangan Sampah</b>	<b>30%</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>	<b>100%</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>	<b>100%</b>	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Persentase timbulan sampah dan sampah telah terdaur ulang dan termanfaatkan</b>	<b>30%</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>	<b>100%</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>	<b>100%</b>	
2	11	11	201	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan	34 Unit	32 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	108 Unit	108 Unit	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2025)		
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%) (2025)					
									(2024)	(2024)						
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4						
			Kabupaten/Kota	Pemrosesan Akhir												
2	11	11	201	08	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-		
2	11	11	201	09	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	148 Unit	-	148 Unit	148 Unit	100%	140 Unit	140 Unit	100%		
2	11	11	201	12	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	312.410 Ton	298.404 Ton	305.327 Ton	305.327 Ton	100%	310.037 Ton	310.037 Ton	100%		
2	11	11	201	18	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			
									(2026)	(2023)	(2024)	(2025)	(2025)	
1			2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4		
2	11	11	201	19	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	2.600 Ton	2.600 Ton	2.600 Ton	2.600 Ton	100%	2.600 Ton	2.600 Ton	100%
2	11	11	201	20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	319.658 Ton	298.404 Ton	305.327 Ton	305.327 Ton	100%	-	-	-

Catatan : Realisasi capaian Tahun 2025 masih merupakan asumsi.

Dari tabel Tabel 2.1 dapat dijelaskan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 menurut indikator program yang telah terealisasi dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 18.843.566.972,00-
    - b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 119.490.000,00-
  - B. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 7.308.000,00-
    - b) Penyediaan Peralatan dan Perlenkapan Kantor. Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 102.338.400,00-
    - c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 39.902.000,00-
    - d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 165.976.000,00-
  - C. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    - a) Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 147.680.000,00-
  - D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 443.035.200,00-
    - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 323.858.000,00-

- E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - a) Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Jabatan. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 41.380.000,00-
  - b) Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 774.323.000,00-
  - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 78.050.000,00-
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
  - A. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
    - a) Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 307.949.000,00-
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - A. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
    - a) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 68.135.080,00-
    - b) Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 42.802.000,00-
  - B. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
    - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 59.633.500,00-
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH;

- A. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - a) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 107.651.800,00-
- 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
  - A. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
    - a) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 56.670.000,00-
- 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
  - A. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
    - a) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 75.800.000,00-
- 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
  - A. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota;
    - a) Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 129.495.000,00-
- 9. Program Pengelolaan Persampahan;
  - A. Kegiatan Pengelolaan Sampah;
    - a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 63.325.450.381,00-

- b) Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 20.000.090.200,00-
- c) Penanganan sampah melalui pengangkutan. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 47.171.549.960,00-
- d) Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 141.058.940,00-
- e) Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah. Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 73.510.440,00-

**UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup**

- 10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - A. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 183.688.000,00-
  - B. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 4.793.160,00-
    - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 27.846.000,00-
  - C. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 481.082.600,00-
  - D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 98.395.600,00-
    - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 95.760.000,00-
  - E. Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 55.690.000,00-

11. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- A. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- a) Pengoperasian dan Pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan Kabupaten/Kota. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 91.402.000,00-
- b) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 24.418.000,00-

UPTD TPA Telaga Punggur

12. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- A. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- a) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 53.820.000,00-
- B. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- a) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 2.844.710.880,00-
13. Program Pengelolaan Persampahan
- A. Kegiatan Pengelolaan Sampah;
- a) Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 6.296.947.500,00-

## **2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam implementasi kinerja pelayanan, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan atau usaha yang telah memperoleh pengesahan dan rekomendasi kelayakan lingkungan. Secara umum permasalahan dapat diatasi dengan cara melakukan koordinasi bersama sektor terkait dan aparat lapangan.

Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai

permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam selama tahun 2025-2029 dapat dilihat pada table 2.2. berikut:

Tabel 2.2.

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	n/a	n/a	64.86	69.94	69.16	69.94	64.86	64,86	71	71,5	71,5	
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	n/a	n/a	55	55.5	55.5	56.5	56.5	50,00	53,59	55,19	55,19	
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	n/a	n/a	84.5	94.5	94.5	84.6	85	82,33	89,62	90,93	90,93	
4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	n/a	n/a	63.17	63.24	63.24	63.38	64.45	58,08	70,09	70,42	70,42	
5	Persentase Pengelolaan Sampah	n/a	n/a	77	78	79	80	81	64,50%	67,25%	71,25%	71,25%	
6	Persentase Pengurangan Sampah	n/a	n/a	26	30	30	30	30	17,52%	26%	30%	33%	

Catatan : Realisasi capaian tahun 2025, target tahun 2026 dan proyeksi tahun 2026 masih merupakan asumsi.

Untuk Tahun 2025 sampai dengan bulan September belum dilakukan pengisian data pada aplikasi Sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (SITALA) milik Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH RI karena periode pengisian sistem dibuka pada bulan Nopember 2025 oleh KLHK sehingga belum mendapatkan realisasi capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) namun untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air (IKA) sudah dilakukan pengambilan sample periode pertama sampai dengan bulan agustus serta Indeks Kualitas Lahan (IKL) masih dalam tahapan identifikasi dan pemetaan RTH.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Faktor yang mendorong untuk mencapai kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Dukungan strategi dan kebijakan bidang lingkungahidup di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam strategi umum pada RPJMD;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Terdapat beberapa faktor yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut:

- a. Penurunan kualitas lingkungan hidup (kualitas tanah, udara dan air) erat kaitannya dengan polusi akibat aktivitas manusia, seperti transportasi, industri, pembangkit listrik, serta pengelolaan limbah yang tidak optimal tetapi kontribusi manusia lebih dominan dalam menurunkan kualitas tanah, udara, dan air;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan sampah, termasuk kekurangan fasilitas seperti kontainer serta sarana pengangkut sampah, yang menghambat kelancaran proses pengelolaan sampah secara optimal;
- c. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membuang sampah pada tempatnya serta masih adanya pemukiman kumuh dan rumah liar yang

sulit dijangkau pelayanan pengangkutan sampah oleh DLH;

- d. Keterbatasan Sarana Prasarana pada Gedung Laboratorium yang merupakan aset Satpol PP (Pinjam Pakai) dengan kondisi sudah kurang layak (plafon bocor dan lantai rusak);
- e. Keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk tenaga analis Laboratorium dan petugas pengambil contoh uji;
- f. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Alat Berat (Buldozer dan Excavator) yang ada sering tidak efektif atau dalam kondisi terbatas, sehingga tidak mampu mengimbangi volume sampah setiap hari.

#### 2.3.3 Peluang dan Tantangan.

Adapun peluang dalam peningkatan kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan yang mengedepankan keberlanjutan fungsi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan oleh masyarakat maupun pelaku usaha dalam program Proper, Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, dan sebagainya;
- c. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program edukasi, kampanye lingkungan, dan dukungan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan juga menjadi peluang strategis dalam meningkatkan kinerja pelayanan DLH.

Adapun tantangan dalam peningkatan kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik dan bersih;
- b. Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan;
- c. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- d. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan meningkatnya timbulan sampah;
- e. Semakin berkembangnya industri yang menyebabkan semakin meningkatnya beban pencemaran;
- f. Masih banyak pelaku usaha yang melakukan usaha tanpa memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan.

**2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah**  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mencoba beberapa strategi untuk menghadapi permasalahan di atas, yang diharapkan dapat meminimalkan atau mengurangi permasalahan yang ada. Adapun upaya untuk memperbaiki masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. Mengurangi laju pencemaran dan kerusakan lingkungan secara optimal dan terpadu
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD / Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis SKPD periode 2021-2026 yang telah disusun, dan diperlukan adanya review atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Pada dasarnya yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sudah merupakan kebutuhan dan merupakan skala prioritas untuk dilaksanakan. Hal itu tentu dalam upaya mengakomodir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup guna mendukung fungsi perlindungan dan pengawasan lingkungan hidup dan pelayanan pengangkutan sampah di Kota Batam. Adapun *review* terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel beriku:

**Tabel 2.3.**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Batam Tahun 2026**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>					<b>Rp 101.527.210.311</b>						<b>Rp</b>
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp 101.527.210.311	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp 210.152.590.837	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Batam	Percentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp 21.564.477.055	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Batam	Percentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp 21.881.561.252	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	Percentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terlaksana	100%	Rp 20.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	Percentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terlaksana	100%	Rp 19.552.800	
1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp 5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp 4.917.600	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp 5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp 4.917.600	

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	Rp 5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	2 Laporan	Rp 4.917.600		
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	Rp 5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja	4 Laporan	Rp 4.800.000		
II	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Percentase administrasi keuangan yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 18.260.618.257</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Percentase administrasi keuangan yang</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 18.807.982.251,90</b>		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	93 Orang/bulan	Rp 18.136.196.377	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	117 Orang/bulan	Rp 18.686.242.251,90		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	Rp 124.421.880	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	Rp 121.740.000,00		
III	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Percentase administrasi kepegawaian yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 100.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Percentase administrasi kepegawaian yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 100.000.000</b>		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Rp 100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Rp 100.000.000		

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
IV	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kota Batam	<b>Percentase admininstrasi umum terlaksana</b>	100%	<b>Rp 608.827.618</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kota Batam	<b>Percentase admininstrasi umum terlaksana</b>	100%	<b>Rp 717.111.400</b>		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 29.151.618	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 29.685.400		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 130.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 129.990.400		
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 115.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 114.987.600		
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Rp 334.676.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 442.448.000		
V	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kota Batam	<b>Percentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia</b>	100%	<b>Rp 697.119.460</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kota Batam	<b>Percentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia</b>	100%	<b>Rp 493.326.600</b>		
1	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Rp 125.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	70 Unit	Rp 123.978.300		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	Rp 450.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	Rp 369.348.300		

**RENCANA KERJA TAHUN 2026**

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
	2	3	4	5		7	8	9	1	11		
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Rp 122.119.460	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Rp 0		
VI	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Percentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 770.828.720</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Percentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 734.450.400</b>		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	Rp 443.035.200	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	Rp 442.279.200		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp 327.793.520	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp 292.171.200		
VII	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Percentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.107.083.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Percentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1.009.137.800</b>		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas <small>lobatan</small>	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 41.380.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas <small>lobatan</small>	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Rp 0		
2	Penyedia jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Rp 861.223.00	Penyedia jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kota Batam	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	Rp 804.970.000		

**RENCANA KERJA TAHUN 2026**

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	190 Unit	Rp 110.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100 Unit	Rp 110.430.000		
4	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kota Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	Rp 94.480.000	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kota Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	Rp 93.737.800		
B	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Kota Batam	<b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan</b>	100%	<b>Rp 300.000.000</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Kota Batam	<b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan</b>	100%	<b>Rp 213.776.000</b>		
I	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	100%	Rp 300.000.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) <small>Kabupaten/Kota</small>	Kota Batam	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	100%	Rp 213.776.000		
1	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Batam	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	<b>Rp 300.000.000</b>	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Batam	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	<b>Rp 213.776.000</b>		
C	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Kota Batam	<b>Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Kualitas Lahan (IKL)</b>	<b>55,50; 84,50; 63,24 Indeks</b>	<b>Rp 1.174.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Kota Batam	<b>Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Kualitas Lahan (IKL)</b>	<b>55,50; 84,50; 63,24 Indeks</b>	<b>Rp 737.968.300</b>		
I	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	Rp 924.000.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	Rp 594.207.100		
1	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan	150 0 <small>Dokumen</small>	Rp 200.000.0	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan	-	Rp 0		

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut		Terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut			Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut		Terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut				
2	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Batam	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan)	1 Lokasi	Rp 200.000.000	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Batam	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan)	14 Lokasi	Rp 324.080.900		
3	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Batam	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	3 Laporan	Rp 450.000.000	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Batam	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	3 Laporan	Rp 199.999.600		
4	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Kota Batam	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	Rp 74.000.000	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Kota Batam	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	Rp 70.126.600		
II	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	<b>Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	100%	<b>Rp 250.000.000</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	<b>Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	100%	<b>Rp 29.895.400</b>		
1	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Batam	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	6 Titik	Rp 250.000.000	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Batam	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	2 Titik	Rp 29.895.400		

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)			
	2	3	4	5		7	8	9	10	11			
III	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	100%	Rp 0	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	Rp 113.865.800			
1	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kota Batam	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1000 M2	Rp 0	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kota Batam	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1000 M2	Rp 113.865.800			
D	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Kota Batam	Persentase Perizinan yang Dibina dan Diawasi	80%	Rp 470.000.000	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Kota Batam	Persentase Perizinan yang Dibina dan Diawasi	80%	Rp 363.074.200			
I	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan	80%	Rp 470.000.000	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan	80%	Rp 363.074.200			
1	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kota Batam	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	Rp 200.000.000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kota Batam	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	Rp 140.478.200			

**RENCANA KERJA TAHUN 2026**

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan (Rp.)		
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Batam	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	100 Badan Usaha	Rp 270.000.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Batam	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	320 Badan Usaha	Rp 222.596.000		
E	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Kota Batam	<b>Persentase peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 400.000.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Persentase peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 394.159.000</b>		
I	<b>Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	<b>Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup</b>	<b>2 Jumlah</b>	<b>Rp 400.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup</b>	<b>2 Jumlah</b>	<b>Rp 394.159.000</b>		
1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Batam	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen	Rp 200.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Batam	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	7 Dokumen	Rp 195.063.600		
2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Batam	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	300 Orang	Rp 200.000.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Batam	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	400 Orang	Rp 199.095.400		

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
F	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Batam	Persentase penghargaan lingkungan hidup Untuk Masyarakat	100%	Rp. 172.258.339	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Batam	Persentase penghargaan lingkungan hidup Untuk Masyarakat	-	Rp 0		
I	Pemberian Penghargaan		Penghargaan	5 Jumlah	Rp 172.258.339	Pemberian Penghargaan	Kota Batam	Penghargaan	-	Rp 0		
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Batam	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang di nilai kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	Rp 172.258.339	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Batam	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang di nilai kinerjanya dalam rangka PPLH	-	Rp 0		
G	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Kota Batam		90%	<b>Rp 455.730.000</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Kota Batam	<b>Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa</b>	90%	<b>Rp 220.408.100</b>		
I	Penyelesaian Pengaduan	Kota		90%	<b>Rp 455.730.000</b>				90%	<b>Rp 220.408.100</b>		
1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	45 Pengaduan	Rp 225.730.000	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kota Batam	Jumlah pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	45 Pengaduan	Rp 148.710.000		

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)			
	2	3	4	5		7	8	9	10	11			
2	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kota Batam	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 Sanksi	Rp 230.000.000	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kota Batam	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan	2 Sanksi	Rp 71.698.100			
H	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Kota Batam	<b>Persentase Pengurangan Sampah</b>	30%	<b>Rp 76.990.744.917</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Kota Batam	<b>Persentase Pengurangan Sampah</b>	30%	<b>Rp 183.701.649.985</b>			
I	<b>Pengelolaan Sampah</b>	Kota Batam	<b>Persentase timbulan sampah dan sampah terpilah terdaur ulang dan termanfaatkan</b>	30%	<b>Rp 81.954.525.000</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	Kota Batam	<b>Persentase timbulan sampah dan sampah terpilah terdaur</b>	30%	<b>Rp 183.701.649.985</b>			
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	34 Unit	Rp 13.051.894.797	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan	414 Unit	Rp 89.009.919.977			
2	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Kota Batam	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	158 Unit	Rp 14.705.313.400	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan	Kota Batam	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	158 Unit	Rp 19.383.483.500			
3	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kota Batam	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	317 Ton	Rp 47.365.229.280	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kota Batam	Jumlah sampah yang tertangani melalui	464.808 Ton	Rp 73.474.120.348			
4	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kota Batam	Jumlah laporan hasil Kegiatan pengurangan	2 Laporan	Rp 1.188.272.1	Pengurangan sampah melalui pembatasan	Kota Batam	Jumlah laporan hasil Kegiatan pengurangan	2 Laporan	Rp 1.241.220.120			

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	6		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		
			sampah melalui pembatasan timbulan sampah					sampah melalui pembatasan timbulan sampah				
5	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kota Batam	Jumlah sampah yang terdaur	2600 Ton	Rp 680.035.320	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kota Batam	Jumlah sampah yang terdaur	2.600 Ton	Rp 592.906.040		
<b>UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP</b>					<b>Rp 1.111.578.000</b>						<b>Rp 841.130.975</b>	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp 1.111.578.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN				Rp 841.130.975		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	Rp 942.160.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT	Kota Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	Rp 596.285.800		
I	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi kepegawaian yang terlaksana	100%	Rp 200.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi kepegawaian yang terlaksana	100%	Rp 194.341.000		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Rp 200.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Rp 194.341.000		
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi umum terlaksana	100%	Rp 62.315.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi umum	100%	Rp 34.250.000		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Rp 19.562.000		
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 42.315.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	Rp 14.688.000		

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
III	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	100%	Rp 430.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	100%	Rp 122.080.000		
1	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Rp 80.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Rp 42.018.000		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Rp 200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Rp 80.062.000		
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	Rp 150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	-	Rp 0		
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Batam	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	Rp 194.155.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Batam	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	Rp 189.924.800		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Rp 98.395.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Rp 94.164.800		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 95.760.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 95.760.000		
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	100%	Rp 55.690.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	100%	Rp 55.690.000		

## RENCANA KERJA TAHUN 2026

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Rp 55.690.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Rp 55.690.000		
B	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Kota Batam	Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Tutupan Hutan (ITH)	55,19; 90,93; 70,42 Indeks	Rp 169.418.000	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Kota Batam	Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Tutupan Hutan (ITH)	55,19; 90,93; 70,42 Indeks	Rp 244.845.175		
I	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	Rp 169.418.000	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Kota Batam	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	Rp 244.845.175		
1	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan	Kota Batam	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan	13 Unit	Rp 95.000.000	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan	Kota Batam	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan	13 Unit	Rp 74.195.175		
2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kota Batam	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	11 Dokumen	Rp 74.418.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kota Batam	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	11 Dokumen	Rp 170.650.000		
<b>UPTD TELAGA PUNGUR</b>					<b>Rp 8.150.000.000</b>						<b>Rp 11.137.712.524</b>	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN</b>				<b>Rp 8.150.000.000</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN</b>				<b>Rp 11.137.712.524</b>		
A	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT</b>	Kota Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp 3.002.156.160	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT</b>	Kota Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp 3.646.994.524		

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)			
	2	3	4	5		7	8	9	10	11			
I	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase adminstrasi umum terlaksana	100%	Rp 49.680.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase adminstrasi umum terlaksana	100%	Rp 49.680.000			
1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 49.680.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 49.680.000			
II	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Batam	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	Rp 2.952.476.160	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Batam	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	Rp 3.597.314.524			
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	Rp 2.952.476.160	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	Rp 3.597.314.524			
B	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kota Batam	Persentase Pengurangan Sampah	30%	Rp 5.147.843.840	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kota Batam	Persentase Pengurangan Sampah	30%	Rp 7.955.118.000			
I	Pengelolaan Sampah	Kota Batam	Persentase timbulan sampah dan sampah terpilah terdaur ulang dan	30%	Rp 5.147.843.840	Pengelolaan Sampah	Kota Batam	Persentase timbulan sampah dan sampah terpilah terdaur ulang dan	30%	Rp 7.490.718.000			
1	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Kota Batam	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan	17 Unit	Rp 5.147.843.840	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Kota Batam	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	17 Unit	Rp 7.490.718.000			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	<b>URUSAN PEKERJAAN UMUM</b>				<b>Rp 2.639.993.999,80</b>	<b>URUSAN PEKERJAAN UMUM</b>				<b>Rp 2.639.993.999,80</b>		
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Kota Batam</b>	Percentase Fasilitas Pengelolaan Sampah yang terbangun	37.5%	<b>Rp 2.639.993.999,80</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Kota Batam</b>	Percentase Fasilitas Pengelolaan Sampah yang terbangun	37.5%	<b>Rp 2.639.993.999,80</b>		
<b>I</b>	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	<b>Kota Batam</b>	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	72 Ton/Hari	<b>Rp 2.639.993.999,80</b>	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	<b>Kota Batam</b>	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	72 Ton/Hari	<b>Rp 2.639.993.999,80</b>		
<b>1</b>	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	<b>Kota Batam</b>	Jumlah Fasilitas TPS 3R/TPST yang telah terbangun	6 Unit	<b>Rp 2.639.993.999,80</b>	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	<b>Kota Batam</b>	Jumlah Fasilitas TPS 3R/TPST yang telah terbangun	6 Unit	<b>Rp 2.639.993.999,80</b>		
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 110.788.788.311</b>	<b>JUMLAH</b>				<b>Rp 222.131.434.336</b>		

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Renja PD selain berasal dari Rencana Kerja pemerintah daerah, juga mempertimbangkan usulan dari berbagai pemangku kepentingan. Usulan masyarakat disampaikan melalui musrenbang secara bertingkat dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota. Sementara usulan DPRD Kota Batam berupa pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses DPRD Kota Batam yang telah diparipurnakan dan disampaikan baik secara tertulis maupun terinput dalam SIPD RI.

Telaahan usulan dari berbagai kepentingan yang masuk pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini. Terdapat beberapa usulan masyarakat dan pokir Dewan yang terangkum dalam RKPD Kota Batam tahun 2026. Berikut adalah tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan kota Batam tahun 2026.

**Tabel 2.4.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota**  
**Batam Tahun 2026**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Pengelolaan Persampahan	Kota Batam	Persentase Pengurangan Sampah		
A	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kota Batam	Persentase timbulan sampah dan sampah telah terdaur ulang dan termanfaatkan		
1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan		

**RENCANA KERJA TAHUN 2026**

	a. Pengadaan Bin Container	Kawasan Gereja HKBP Mahanaim Kel Kibing, Kec. Batu Aji	-	1 Unit	
	b. Pengadaan Bin Container	Baloi Kolam RT.006/RW. 016 Kel. Sei Panas Kec. Batam Kota	-	1 Unit	

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator	Besaran / Volum	Catatan
1	2	3	4	5	6
	c. Pengadaan Bin Container	Kelurahan Sei Pelunggut		1 Unit	
	d. Pengadaan Bin Container	Jalan Prambanan RT 02 RW 05, RT 03 RW 03 Kampung Seraya, Bengkong Bengkel RT 03 RW 08, Bengkong Bengkel RT 04 RW 08, RT 06 RW 01 Kampung Seraya		5 Unit	
	e. Pengadaan Bin Container	Kelurahan Bukit Tempayan	-	1 Unit	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Semua Usulan sesuai dengan table 2.5 di atas, baik berupa Aspirasi dan Pokir DPRD Kota Batam Tahun 2026 akan diakomodir oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan azas kelengkapan readiness criteria (kelengkapan pendukung) dan ketersediaan dana.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Lingkungan Hidup**

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim adalah merupakan salah satu dari Tujuh Agenda Pokok Pembangunan Nasional Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2020-

2024 berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni:

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
3. Menerapkan Pendekatan Pembangunan Rendah Karbon.

Dari tiga kebijakan tersebut yang berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja pemerintahan yaitu khususnya Dinas Lingkungan Hidup selaku pelaksanaan kebijakan publik, yaitu "Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup". Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata mencerminkan permasalahan yang masih dihadapi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat pembangunan sumberdaya manusia yang masih timpang. Pertumbuhan ekonomi yang stabil tidak selalu berbanding lurus dengan kondisi lingkungan. Pembangunan ekonomi Indonesia masih bertumpu pada sumberdaya alam, sehingga menyebabkan deplesi dan degradasi lingkungan, dimana kualitas lingkungan hidup yang dicerminkan pada kualitas air, udara dan lahan masih rendah.

Sasaran pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yang menyentuh bidang lingkungan hidup terdapat pada poin (2) adalah: Meningkatnya penerapan peduli alam dan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kualitas

ingkungan hidup, yang tercermin pada membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Sedangkan arahan kebijakan dan strategi pembangunan terdapat pada poin (3) yaitu, Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup, melalui strategi: (i) peningkatan kualitas air, udara dan tanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH; (ii) pengembangan sistem neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; (iii) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK); (iv) penurunan tingkat deforestasi dan kebakaran hutan, meningkatnya tutupan hutan (*forest cover*) serta penjagaan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati; (v) pengendalian pencemaran laut, pesisir, sungai, dan danau; (vi) pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan (vii) pengurangan limbah padat dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Dalam pelaksanaan amanah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), bidang Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup menjadi modal utama pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi berbasis SDA dan LH, namun terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam lima tahun mendatang dihadapi yaitu: 1) produktivitas lahan pertanian dan luas lahan baku sawah yang semakin menurun; 2) sistem irigasi termasuk kondisi waduk pada saat musim kemarau yang semakin memprihatinkan; 3) produktivitas dan daya saing hasil perikanan belum optimal; 4) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil belum optimal; 5) ketergantungan pada bahan bakar fosil (batubara dan migas) sebagai sumber energi; 6) pemanfaatan sumber energi terbarukan belum optimal; 7) sumber daya air belum terkelola dengan baik; 8) belum pulihnya kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas Nasional; 9) luas hutan dan lahan kritis yang masih tinggi dan laju deforestasi yang masih relatif tinggi; 10) kualitas lingkungan hidup yang menurun dan pengelolaan limbah/beban pencemaran yang belum optimal; 11) pengelolaan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang belum optimal; 12) dampak perubahan iklim yang semakin terasa, dan; 13) frekuensi kejadian bencana dan kerentanan wilayah dan masyarakat terhadap bencana semakin meningkat.

Untuk melaksanakan pembangunan SDA dan LH dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional berkelanjutan, terdapat 11 (sebelas) isu strategis yang perlu ditangani, yaitu: 1) pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan; 2) pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani; 3) peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan/pengelola dan pemasar hasil perikanan/petambak garam; 4) peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan; 6) peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS; 7) penguatan pasokan, bauran dan efisiensi konsumsi energi; 8) peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan; 9) peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian KEHATI; 10) penganggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana; 11) penanganan perubahan iklim serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

Kebijakan Pembangunan Nasional terhadap lingkungan hidup adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga pembangunan yang dilakukan selalu mempertimbangkan kaidah – kaidah lingkungan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan seperti yang diamanatkan pada Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan amanat Undang – Undang No 32 Tahun 2009, setiap rencana pembangunan harus menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan setiap Rencana, Kebijakan, dan Program yang diterbitkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Agar amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka diciptakan instrument-instrument pengelolaan lingkungan yang antara lain :

- 1) KLHS;
- 2) Tata Ruang;
- 3) Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- 4) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 5) Amdal;
- 6) UKL-UPL;
- 7) Perizinan;
- 8) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- 9) Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup;
- 10) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
- 11) Analisis Risiko Lingkungan Hidup;
- 12) Audit Lingkungan Hidup; dan
- 13) Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup**

Kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini yakni mewujudkan “*Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya*”.

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lampiran h tentang kewenangan daerah dalam bidang lingkungan hidup, dimana target-target pada regulasi di atas diakomodasi dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan dijabarkan dalam

Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah Bidang Lingkungan Hidup dengan mensinkronkan terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi saat ini, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun sebagai pedoman perencanaan penyusunan kegiatan pada tahun berjalan, dengan tujuan antara lain:

- a. Terwujudnya Kota Batam yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang;
- b. Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan;
- c. Tersedianya peralatan dan fasilitas minimum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan;
- d. Terwujudnya ketataan pelaku kegiatan usaha serta masyarakat terhadap peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, dan dapat dicapai. Sasaran yang diterapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui Tindakan- tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan 5 (lima) tahun kedepan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam menetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pemanfaatan dan tata ruang yang berwawasan lingkungan;
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tamping lingkungan;
- c. Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, bersih, nyaman, dan terpadu serta Kawasan permukiman yang layak huni.

**Tabel 3.1.**  
**Target, Tujuan dan Sasaran**  
**Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2026
1	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah	Nilai SAKIP PD	73.71
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	92.90
3	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68.94
		Indeks Kualitas Air (IKA)	55,50
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,50
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	63.24
4	Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam	Persentase Pengelolaan Sampah	78%
		Persentase Pengurangan Sampah	30%

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029

### 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026 yang dirinci dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026. Rencana Kerja ini merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan yang terbagi lagi menjadi beberapa sub kegiatan. Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan untuk tahun anggaran 2026 juga mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
1. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
  2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
  4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
1. Pengadaan Mebel
  2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  4. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- B. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
- a) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota:
    1. Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota.
- C. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
- a) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    1. Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut;
    2. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
    3. Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah;
    4. Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota;
    5. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
  - b) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
    1. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

- a) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

**D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**

- a) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
1. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
  2. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**E. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup;
  2. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup.

**F. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**

- a) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota ;
2. Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

**G. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

- a) Kegiatan Pengelolaan Sampah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;
  2. Pengoperasian dan pemeliharaan sarana penanganan sampah;
  3. Penanganan sampah melalui pengangkutan;
  4. Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah;
  5. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah;
  6. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional.

Pada tahun 2026, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari 12 (dua belas) Program, 24 (dua puluh empat) Kegiatan, dan 52 (lima puluh dua) Sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp 110.788.788.311 (Seratus Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah) yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2026 Kota Batam.

Berikut adalah tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Batam:

**Tabel 3.2.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027**  
**Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP					210.152.590.837		101.406.416.686		
2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					210.152.590.837		101.406.416.686		
2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%	21.881.561.252			100%	23.907.595.844	
2	11	01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Batam	100%	19.552.800	PAD		100%	66.000.000	
2	11	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	4.917.600	PAD		2 Dokumen	16.500.000
2	11	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2 Dokumen	4.917.600	PAD		2 Dokumen	16.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	11	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Batam	2 Laporan	4.917.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	16.500.000
2	11	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Batam	4 Laporan	4.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	16.500.000
2	11	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terlaksana	Kota Batam	100%	18.807.982.251,90	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	20.223.544.106
2	11	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Batam	117 Orang/bulan	18.686.242.251,90	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		93 Orang/bulan	19.949.815.970
2	11	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam	2 Dokumen	121.740.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	136.864.068
2	11	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	136.864.068
2	11	01	205		Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawai terlaksana	Kota Batam	100%	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	275.000.000
2	11	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam	5 Orang	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Orang	275.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	11	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase admininstrasi umum terlaksana	Kota Batam	100%	717.111.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	639.268.999
2	11	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Batam	2 Paket	29.685.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	30.609.199
2	11	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	Kota Batam	1 Paket	129.990.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	136.500.000
2	11	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan kantor tersedia	Kota Batam	2 Paket	114.987.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	120.750.000
2	11	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terlaksana	Kota Batam	12 Laporan	442.448.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Laporan	351.409.800
2	11	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	Kota Batam	100%	493.326.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	731.975.433
2	11	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam	70 Unit	123.978.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	131.250.000
2	11	01	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	29 Unit	396.348.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33 Unit	472.500.000
2	11	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	0 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Unit	128.225.433

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	11	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	Kota Batam	100%	734.450.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	809.370.156
2	11	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Batam	1 Laporan	442.279.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	465.186.960
2	11	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Batam	12 Laporan	292.171.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	344.183.196
2	11	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	Kota Batam	100%	1.009.137.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1.162.437.150
2	11	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	43.449.000
2	11	01	209	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Batam	34 Unit	804.970.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		34 Unit	904.284.150
2	11	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Batam	100 Unit	110.430.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		190 Unit	115.500.000
2	11	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kota Batam	1 Unit	93.737.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	99.204.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	Kota Batam	100%	213.776.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	320.000.000
2	11	02	201		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen kajian lingkungan	Kota Batam	100%	213.776.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	320.000.000
2	11	02	201	03	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Kota Batam	1 Dokumen	213.776.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	320.000.000
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Kota Batam	55,50; 84,50; 63,24	737.968.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		56; 84,31; 63,31	1.236.400.000
2	11	03	201		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kota Batam	100%	594.207.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	741.400.000
2	11	03	201	07	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan)	Kota Batam	14 Lokasi	342.080.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Lokasi	440.000.000
2	11	03	201	08	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Kota Batam	3 Laporan	199.999.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	220.000.000
2	11	03	201	11	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Kota Batam	1 Dokumen	70.126.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	81.400.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	11	03	202		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kota Batam	100%	29.895.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	275.000.00
2	11	03	202	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	Kota Batam	2 Titik	29.895.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Titik	275.000.00
2	11	03	203		Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Batam	100%	113.865.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	220.000.000
2	11	03	203	11	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kota Batam	1000 M2	113.865.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1000 M2	220.000.000
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perizinan yang Dibina dan Diawasi	Kota Batam	80%	363.074.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80%	510.000.000
2	11	06	201		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan	Kota Batam	80%	363.074.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80%	510.000.000
2	11	06	201	07	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Batam	10 Orang	140.478.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	220.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	11	06	201	09	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kota Batam	320 Badan Usaha	222.596.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Badan Usaha	290.000.000
2	11	08			<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>394.159.000</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>100%</b>	<b>440.000.000</b>
2	11	08	201		Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Kota Batam	2 Jumlah	394.159.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Jumlah	440.000.000
2	11	08	201	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	Kota Batam	7 Dokumen	195.063.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	220.000.000
2	11	08	201	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kota Batam	400 Orang	199.995.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300 Orang	220.000.000
2	11	10			<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>90%</b>	<b>220.408.100</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>90%</b>	<b>628.513.022</b>
2	11	10	201		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Percentase pengaduan yang terselesaikan	Kota Batam	90%	220.408.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90%	628.513.022

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	11	10	201	09	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kota Batam	45 Pengaduan	148.710.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 Pengaduan	375.513.022
2	11	10	201	10	Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Penerapan Sanksi administrasi yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kota Batam	2 Sanksi	71.698.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Sanksi	253.000.000
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	Kota Batam	30%	183.701.649.985	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33%	74.363.907.820
2	11	11	201		Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah dan sampah telah terdaur ulang dan termanfaatkan	Kota Batam	30%	183.701.649.985	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33%	74.363.907.820
2	11	11	201	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kota Batam	414 Unit	89.009.919.977	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		34 Unit	14.357.084.276
2	11	11	201	09	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Kota Batam	158 Unit	19.383.483.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	-
2	11	11	201	12	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Kota Batam	464.808 Ton	73.474.120.348	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		464.808 Ton	57.951.685.360

## RENCANA KERJA TAHUN 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	11	11	201	18	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kota Batam	2 Laporan	1.241.220.120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	1.307.099.332
2	11	11	201	30	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Kota Batam	2.600 Ton	592.906.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.600 Ton	748.038.852
					UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP				841.130.975				1.222.734.800
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				841.130.975				1.222.734.800
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam	100%	596.285.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1.036.375.000
2	11	01	205		Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawai yang terlaksana	Kota Batam	100%	194.341.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	220.000.000
2	11	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam	5 Orang	194.341.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Orang	220.000.000
2	11	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase admininstrasi umum terlaksana	Kota Batam	100%	34.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	68.545.500
2	11	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	19.562.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	22.000.000
2	11	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	14.688.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	46.545.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	11	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	Kota Batam	100%	122.080.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	473.000.000
2	11	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	42.018.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	88.000.000
2	11	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	8 Unit	80.062.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Unit	220.000.000
2	11	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	165.000.000
2	11	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	Kota Batam	100%	189.924.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	213.570.500
2	11	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	94.164.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	108.234.500
2	11	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	95.760.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	105.336.000
2	11	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	Kota Batam	100%	55.690.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	61.259.000
2	11	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	2 Unit	55.690.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	61.259.000

**RENCANA KERJA TAHUN 2026**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1			2		3		4	5	6	7	8	9	10
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Kota Batam	55,50; 84,50; 63.24 Indeks	244.845.175	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		56; 84,31; 63,31 Indeks	186.359.800
2	11	03	201		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Percentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kota Batam	100%	244.845.175	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	186.359.800
2	11	03	201	09	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Kota Batam	13 Unit	74.195.175	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Unit	104.500.000
2	11	03	201	15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kota Batam	11 Dokumen	170.650.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Dokumen	81.859.800
					UPTD TPA TELAGA PUNGUR				11.137.712.524				6.791.603.776
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.137.712.524				6.791.603.776
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam	100%	3.646.994.524	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	3.302.403.776
2	11	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase administrasi umum terlaksana	Kota Batam	100%	49.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	54.680.000
2	11	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	49.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	54.680.000
2	11	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	100%	3.597.314.524	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	3.247.723.776

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
				tersedia							
2	11	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dalam	12 Laporan	3.597.314.524	(PAD)	12 Laporan
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Percentase Penurangan	Kota	30%	7.955.118.000		33%
2	11	11	201		Pengelolaan Sampah	Percentase timbulan	Dalam	30%	7.955.118.000	(PAD)	33%
2	11	11	201	09	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Dalam	7 Unit	7.955.118.000	PENDAPATAN (PAD)	7 Unit
<hr/>											

**RENCANA KERJA TAHUN 2026**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	03	03	04	201	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.639.993.999,80				-	
1	03	04	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Fasilitas Pengelolaan Sampah yang terbangun	Kota Batam	100%	2.639.993.999,80	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	-
1	03	04	201	20	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	Kota Batam	100%	2.639.993.999,80	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	-
1	03	04	201	20	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Jumlah Fasilitas TPS 3R/TPST yang telah terbangun	Kota Batam	Paket	2.639.993.999,80	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	-
<b>Jumlah</b>								<b>222.131.434.336,80</b>				<b>109.420.755.262</b>	

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target sebesar capaian kinerja, kebutuhan dan sumber dana/pagu indikatif.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan indikator pada sub kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, yang mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025 dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

Adapun program, kegiatan dan rincian sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2026**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam**

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			Nasional	Daerah					
			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP				841.130.975,00									1.057.734.800,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				841.130.975,00									1.057.734.800,00		
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				841.130.975,00									1.057.734.800,00		
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Keskretariatan PD	-	Nilai SAKIP PD	92.9	596.285.800,00	Nilai						-	871.375.000,00		
2	11	01	2.05	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-	100 %	194.341.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	-	220.000.000,00		
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			5 Orang	194.341.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		220.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

## RENCANA KERJA TAHUN 2026

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-			100 %	34.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	-	68.545.500,00	
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	19.562.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		22.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	14.688.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		46.545.500,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-			100 %	122.080.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	-	308.000.000,00	
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Unit	42.018.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		88.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					8 Unit	80.062.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		220.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

## RENCANA KERJA TAHUN 2026

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah						
2	11	01	2.08	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	11	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-			100 %	189.924.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	-	213.570.500,00		
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	94.164.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		108.234.500,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	95.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		105.336.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-				100 %	55.690.000,00							
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2 Unit	55.690.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		61.259.000,00		
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya														

## RENCANA KERJA TAHUN 2026

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai Antara Mutu Air Nilai Antara Kualitas Udara Kualitas Tutupan Lahan	-			3.1 Indeks 0.38 Indeks 0.4 Indeks	244.845.175,00						-	186.359.800,00	
2	11	03	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Percentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	-			100 %	244.845.175,00			-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	-	186.359.800,00	
2	11	03	2.01	0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota				13 Unit	74.195.175,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		104.500.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				11 Dokumen	170.650.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		81.859.800,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

## RENCANA KERJA TAHUN 2026

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
								11.137.712.524,00								6.791.603.776,00	
2								URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.137.712.524,00							6.791.603.776,00	
2	11							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	11.137.712.524,00							6.791.603.776,00	
2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-		73.71 Nilai 92.9 Nilai	3.646.994.524,00						-	3.302.403.776,00	
2	11	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-		100 %	49.680.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	-	54.680.000,00	
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	49.680.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		54.680.000,00	UPTD TPA TELAGA PUNGUR
2	11	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-		100 %	3.597.314.524,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	-	3.247.723.776,00	
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	3.597.314.524,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		3.247.723.776,00	UPTD TPA TELAGA PUNGUR

## RENCANA KERJA TAHUN 2026

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
												Nasional	Daerah						
2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	-		30 %	7.490.718.000,00						-	3.489.200.000,00			
2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani Jumlah Sampah yang dikurangi	-		464808 ton 78695 ton	7.490.718.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	-	3.489.200.000,00			
2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah														
					Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik			7 Unit	7.490.718.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		3.489.200.000,00	UPTD TPA TELAGA PUNGGUR		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP			210.152.590.837,00							103.747.878.185,00				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.639.993.999,80								2.650.000.000,00			
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			2.639.993.999,80								2.650.000.000,00			
1	03	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Fasilitas Pengelolaan Sampah yang terbangun	-		37.5 %	2.639.993.999,80						-	2.650.000.000,00			

## RENCANA KERJA TAHUN 2026

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
													Nasional	Daerah					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas TPS 3R/TPST yang telah terbangun	-		6 unit	2.639.993.999,80			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Masyarakat	-	2.650.000.000,00		
1	03	04	2.01	0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun			72 Ton/hari	2.639.993.999,80	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Masyarakat		2.650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					207.512.596.837,20							101.097.878.185,00		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					207.512.596.837,20							101.097.878.185,00		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-		73.71 Nilai 92.9 Nilai	21.881.561.251,90						-	23.599.057.343,00		
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	-		100 %	19.552.800,00			-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	-	66.000.000,00		

## RENCANA KERJA TAHUN 2026

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
2	11	01	2.01	0004								Nasional	Daerah					
2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			2 Dokumen	4.917.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			2 Dokumen	4.917.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	4.917.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0 Laporan	4.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	-			100 %	20.914.297.590,00			-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	20.086.680.038,00	
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			117 Orang/bulan	20.914.297.590,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	19.949.815.970,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

## RENCANA KERJA TAHUN 2026

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	121.740.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	136.864.068,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-		100 %	100.000.000,00			-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	275.000.000,00	
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5 Orang	100.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-		100 %	717.111.400,00			-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	639.268.999,00	
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	29.685.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	30.609.199,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

## RENCANA KERJA TAHUN 2026

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
													Nasional	Daerah					
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Paket	129.990.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			136.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	114.987.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	120.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	442.448.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan			351.409.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-		100 %	493.326.600,00			-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	-	603.750.000,00		
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		87 Unit	123.978.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		131.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		60 Unit	369.348.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		472.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-		100 %	734.450.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	-	809.370.156,00		

## RENCANA KERJA TAHUN 2026

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
												Nasional	Daerah							
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1	Laporan	442.279.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		465.186.960,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12	Laporan	292.171.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		344.183.196,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-			100 %	1.009.137.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	-	1.118.988.150,00		
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					34 Unit	804.970.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		904.284.150,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100 Unit	110.430.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		115.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

## RENCANA KERJA TAHUN 2026

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							Nasional	Daerah					
2	11	01	2.09	0009	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	93.737.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		99.204.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Percentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	-		40 %	213.776.000,00						-	320.000.000,00		
2	11	02	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Percentase ketersediaan dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	-		40 %	213.776.000,00			-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	-	320.000.000,00		
2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan			1 Dokumen	213.776.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	320.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai Antara Kualitas Udara Kualitas Tutupan Lahan Nilai Antara Mutu Air	-		0.38 Indeks 0.4 Indeks 3.1 Indeks	737.968.300,00						-	1.236.400.000,00		
2	11	03	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Percentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	-		100 %	594.207.100,00			-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	-	741.400.000,00		
2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)			14 Lokasi	324.080.900,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	440.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

## RENCANA KERJA TAHUN 2026

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	11	03	2.01	0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		3 Laporan	199.999.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun		1 Dokumen	70.126.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	81.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	-	100 %	29.895.400,00			-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	275.000.000,00		
2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan		6 Titik	29.895.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	100 %	113.865.800,00			-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	220.000.000,00		
2	11	03	2.03	0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		1000 M2	113.865.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

## RENCANA KERJA TAHUN 2026

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah				
2	11	06	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase persetujuan lingkungan yang dibina dan diawasi	-			90 %	363.074.200,00					-	510.000.000,00		
2	11	06	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	-		90 %	363.074.200,00			-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	510.000.000,00		
2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup												
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				10 Orang	140.478.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				320 Badan Usaha	222.596.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	290.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan masyarakat yang Dibina dalam Pemahaman Lingkungan Hidup	-		2 %	394.159.000,00					-	440.000.000,00		
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan edukasi lingkungan hidup kepada masyarakat	-	4 Dokumen	394.159.000,00			-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	440.000.000,00		

## RENCANA KERJA TAHUN 2026

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						10	11	12	13	14	15	16	17	
2	11	08	2.01	0002	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			13 Dokumen	195.063.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan		-	220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup						450 Orang	199.095.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan dan sengketa bidang Lingkungan Hidup yang diselesaikan	-		90 %	220.408.100,00						-	628.513.022,00			
2	11	10	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang terselesaikan	-		90 %	220.408.100,00						-	628.513.022,00			
2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						45 Pengaduan	148.710.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan		375.513.022,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	2.01	0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota						2 Sanksi	71.698.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan		253.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

## RENCANA KERJA TAHUN 2026

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17
2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	-		30 %	183.901.531.486,00							-	74.363.907.820,00		
2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang dikurangi Jumlah sampah yang tertangani	-		78695 ton 464808 ton	183.901.531.486,00					Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-	-	74.363.907.820,00	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		212 Unit	85.109.554.778,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		14.357.084.276,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		158 Unit	45.773.631.748,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		

## RENCANA KERJA TAHUN 2026

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan			464808 Ton	51.184.218.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		57.951.685.360,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah														
					Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah			1 Laporan	1.241.220.120,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		1.307.099.332,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah														
					Jumlah sampah yang terdaur ulang			2600 Ton	592.906.040,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			2. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan	-		748.038.852,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
J U M L A H																		111.597.216.761,00	

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja**

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2026 terdiri dari 12 Program, 24 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dasar perubahan RKPD Tahun 2026, maka akan dilakukan perubahan Rencana Kerja Tahun 2026.

## **5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan**

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tahun 2025-2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja PD menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedoman hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
2. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

## **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Program dan kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku;
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang

telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;

3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran Bidang Lingkungan Hidup.

Wali Kota Batam

AMSAKAR ACHMAD